

Judul : Peduli Legislatif
Tanggal : Senin, 15 April 2019
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 7

Peduli Legislatif



ABDUL MU'TI

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah,
Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pemilu 2019 merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia akan memilih presiden-wakil presiden, anggota DPD, DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota secara bersamaan. Sistem pemilu tersebut merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan satu-satunya di dunia. Pemilu serentak bertujuan agar proses politik lebih efisien, menghapuskan politik uang, dan menghilangkan *election fatigue*.

Akan tetapi, antusiasme masyarakat untuk memilih presiden-wakil presiden jauh lebih tinggi dibandingkan dengan memilih anggota legislatif. Hal tersebut terlihat dari perdebatan publik di media massa dan media sosial serta kampanye terbuka. Masyarakat begitu fanatik mendukung calon presiden-wakil presiden. Mereka rela menyumbang dana dan tenaga untuk kemenangan calon idamannya.

Terhadap calon legislatif, masyarakat tampak *adem-ayem*, bahkan cenderung pasif. Geliat sedikit terlihat untuk calon anggota DPD, terutama yang diusung oleh organisasi sosial dan keagamaan.

Citra Legislatif

Rendahnya dukungan masyarakat terhadap calon legislatif disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, adanya pemahaman bahwa anggota legislatif kurang berperan dalam penyelenggaraan negara. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipan-

dang lebih strategis dan otoritatif dalam menentukan jalannya pemerintahan. Posisi presiden sebagai pemimpin eksekutif dinilai lebih tinggi dari legislatif.

Kedua, citra buruk lembaga legislatif, khususnya DPR dan DPRD, di mata sebagian besar masyarakat. Survei menyebut lembaga legislatif sebagai salah satu institusi negara yang paling korup. Penilaian publik semakin buruk dengan gaya hidup sebagian anggota legislatif yang glamor, hedonis, dan jauh dari moralitas utama.

Ketiga, faktor psikologis karena kedekatan personal. Dalam pemilihan presiden hanya ada duapasangan calon. Hal ini berdampak pada kuatnya ikatan emosional, sentimen pribadi, bahkan polarisasi pilihan. Sementara untuk legislatif terdapat banyak calon yang berdampak pada distribusi pilihan dan lemahnya ikatan.

Faktor lainnya adalah misal strategi kampanye para calon anggota legislatif. Seperti tidak ada cara lain kecuali memasang foto diri di tempat umum. Cara kuno yang tidak simpatik dan menimbulkan sampah.

Memilih Legislatif

Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan kekuasaan yang tidak terbatas (*absolutisme*). Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sebagai lembaga legislatif, kedudukan DPR sangat kuat karena setiap undang-undang harus mendapat persetujuan DPR (Pasal 20 UUD 1945). Undang-undang mengikat warga negara dan penyelenggara negara. Jalannya suatu pemerintahan sangat dipengaruhi oleh undang-undang. Masa depan

negara ditentukan oleh kualitas anggota legislatif.

Dengan demikian, sangat disayangkan jika masyarakat tidak peduli dengan anggota legislatif. Memang benar banyak anggota legislatif yang terkena masalah hukum. Tetapi, tidak sedikit anggota legislatif yang bersih, mumpuni, berdedikasi, dan berintegritas tinggi.

Demi masa depan bangsa, diperlukan kepedulian yang tinggi terhadap kualitas anggota legislatif. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui beberapa langkah. *Pertama*, berpartisipasi aktif dalam proses politik dengan menggunakan hak memilih. Partisipasi politik merupakan bukti warga negara yang bertanggung jawab dan indikator kualitas demokrasi (Diamond, 2008).

Kedua, memilih calon anggota legislatif yang kompeten, bersih, aspiratif, dan bermoral luhur dengan pertimbangan rasional dan objektif. Tidak seharusnya masyarakat memilih caleg *musta'mal*: cacat moral dan bermasalah hukum (Mu'ti, 2019).

Ketiga, menghindari segala bentuk jual beli suara (*vote buying*) untuk menjaga marwah pribadi dan membangun lembaga legislatif yang bersih dan berwibawa. Di tengah apatisme masyarakat sebagian calon anggota legislatif menggunakan kekuatan material untuk mendulang suara. Dalam bukunya *What Money Can't Buy* (2009), Michael Sandel mensinyalir kecenderungan penggunaan uang sebagai senjata ampuh merebut kekuasaan, jabatan, dan kedudukan.

Pemilu legislatif merupakan penentuan pemandu masa depan bangsa. Memilih adalah wujud nasionalisme dan heroisme politik untuk Indonesia yang lebih baik. Memilih anggota legislatif tidak kalah pentingnya dengan memilih presiden. Mari peduli legislatif. ●